



Informasi yang disampaikan pada media ini
**dapat berubah sesuai proses pengembangan
sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

Panduan

Klasifikasi Kredit Pajak & Sumber Penghasilan

Pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260304

Skenario SPT Tahunan OP

Suami – Istri sebagai pegawai dan menggunakan NIK suami sebagai NPWP

2

Panduan ini digunakan bagi wajib pajak yang akan melaporkan **SPT Tahunan 2025** melalui Coretax dengan kondisi sebagai berikut:

1. Salah satu NIK suami/istri digunakan sebagai NPWP untuk pelaporan SPT Tahunan 2025;
2. Dalam panduan ini, NIK suami digunakan sebagai NPWP untuk melapor, sementara NPWP istri berstatus Non – Aktif (NA);
3. Suami dan Istri aktif bekerja sebagai pegawai pada satu perusahaan / instansi (tidak ada sumber penghasilan dari perusahaan lain);
4. Dalam panduan ini suami bekerja pada perusahaan Indonesia Maju dan istri bekerja pada perusahaan Indonesia Emas.

INDUK

Induk SPT Tahunan PPh OP

Informasi Umum

Induk

Draft SPT dalam Coretax :

Setelah Konsep dibuat, maka Sistem akan menampilkan **formulir SPT Tahunan Orang Pribadi** terdiri dari **Induk** dan Lampiran **L-1**.

Wajib Pajak mengisi kolom yang tersedia pada SPT **Induk (main form)** terlebih dahulu. **Lampiran lain** akan muncul sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh WP saat **pengisian Induk**

Tombol **Simpan konsep** selalu tersedia untuk menyimpan draft sementara. Sistem secara otomatis melakukan simpan pada konsep SPT (per 2 menit).

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk L-1

>	HEADER
>	A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
>	B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO
>	C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG
>	D. KREDIT PAJAK
>	E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR
>	F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)
>	G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)
>	H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
>	I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA
>	J. LAMPIRAN TAMBAHAN
>	K. PERNYATAAN

Simpan konsep

Bayar dan Lapor

Pergi ke pencarian

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 L-1

- A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN
- D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN
- E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

Lampiran L-1

6

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

XML Monitoring

Induk **L-1**

- A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN
- D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN
- E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

- > A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- > B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK
- > C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN
- > D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN
- > E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

Simpan Konsep

Bayar dan Laporkan

LAMPIRAN

L-1 Bagian D

Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Pekerjaan

Lampiran L-1

Bagian D. Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Pekerjaan

8

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

> A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK

> B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

> C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

< D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMBERI KERJA ↑↓	NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA ↑↓	PENGHASILAN BRUTO ↑↓	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIAYA ↑↓	PENGHASILAN NETO ↑↓

Tidak ada data yang ditemukan.

JUMLAH BAGIAN D

0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

<<

<

>

>>

10

Secara default tampilan L-1 Bagian D **belum bisa** dilakukan penambahan penghasilan. Perlu untuk menjawab [Ya] Pertanyaan pada Induk Bagian B IKHTISAR PENGHASILAN NETO Pertanyaan 1a.

Induk

B. Ikhtisar Penghasilan Neto

9

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a.

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *

☒ Ya ☐ Tidak

Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D

0

1. b. 1

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *

☒ Ya ☐ Tidak

Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

1. b. 2

Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *

Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu

Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)

1. b. 3

Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *

Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan.

Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)

1. b. 4

Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *

Dagang

Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1

1. b. 5

Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

0

1.c.

Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *

☒ Ya ☐ Tidak

Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B

0

1.d.

Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *

☒ Ya ☐ Tidak

Ya, silahkan mengisi lampiran 2 Bagian C

0

Induk Bagian B. Ikhtisar Penghasilan Neto Pertanyaan [1a] Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yaitu hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pegawai, pekerja, atau karyawan (misalnya: aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, pegawai swasta, pegawai tidak tetap). Untuk memunculkan tombol **Tambah** pada Lampiran **L-1 Bagian D** perlu menjawab **Ya**.

Bagian D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERAJAAN

- A** Tombol **Tambah** akan muncul setelah menjawab pertanyaan pada **Induk Bagian B. Ikhtisar Penghasilan Neto** Pertanyaan **[1a]**
- B** Klik tombol **Refresh** untuk memunculkan penghasilan dalam tabel.

✓ D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

+ Tambah

A

↺ ↻
📄
📁
🗑️
⚙️

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMBERI KERJA ↑↓	NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA ↑↓	PENGHASILAN BRUTO ↑↓	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIA YA ↑↓
		⚙️	⚙️	⚙️	⚙️
	1	Indonesia Maju	0000000000000000	182.000.000	6.000.000
	2	Indonesia Emas	0000000000000000	210.000.000	6.000.000
					JUMLAH BAGIAN D

Bagian D. Penghasilan Neto dalam Negeri dari Pekerjaan

- Data terprepopulasi secara otomatis. Jika terdapat data penghasilan yang kurang, Wajib Pajak dapat menambahkan melalui Tombol "+ Tambah". Selain itu data juga dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah
- Untuk skenario ini, sistem coretax akan menarik penghasilan Tn. A dan Ny. B sebagai pegawai Indonesia Maju dan Indonesia Emas.

Lampiran L-1

Bagian D. Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Pekerjaan

11

- C** Klik logo **Pensil** untuk melihat informasi penghasilan yang bersumber dari pemberi kerja istri. Dalam hal ini, istri menerima penghasilan dari **Indonesia Emas**.

D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN						
+ Tambah						
    						
TINDAKAN	NO.	NAMA PEMBERI KERJA ↑↓	NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA ↑↓	PENGHASILAN BRUTO ↑↓	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIA YA ↑↓	
 	1	Indonesia Maju	0000000000000000	182.000.000	6.000.000	
 	2	Indonesia Emas	0000000000000000	210.000.000	6.000.000	
						JUMLAH BAGIAN D

Lampiran L-1

Bagian D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

12

D Catat **Informasi** yang ada dalam tampilan ini. Kemudian klik tombol **tutup**.

▼ D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

+ Tambah

🔄 📄 📁 📄 📄

TINDAKAN	NO.	NAMA P	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIA YA ↑↓	PENG
✏️ 🗑️	1	Indonesia Maju	6.000.000	
✏️ 🗑️	2	Indonesia Emas	6.000.000	
JUMLAH BAGIAN D				

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

Nomor Identitas Pemberi Kerja * 0000000000000000

Nama Pemberi Kerja * Indonesia Emas

Penghasilan Bruto * 210.000.000

Pengurang Penghasilan Bruto/Biaya * 6.000.000

Penghasilan Neto * 204.000.000

X Tutup Simpan

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10 ▼

Lampiran L-1

Bagian D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

13

- E** Klik logo **Delete** kemudian klik tombol **Yes** untuk menghapus penghasilan yang bersumber dari pemberi kerja istri. Dalam hal ini, istri menerima penghasilan dari **Indonesia Emas**.

✓ D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMBERI KERJA ↑↓	NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA ↑↓	PENGHASILAN BRUTO ↑↓	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIA YA ↑↓
 	1	Indonesia Maju	0000000000000000	182.000.000	6.000.000
 	2	Indonesia Emas	0000000000000000	210.000.000	6.000.000
					JUMLAH BAGIAN D

⚠ Apakah Anda yakin ingin memproses?

No Yes

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10 ▾

Lampiran L-1

Bagian D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

14

- F** Setelah berhasil melakukan penghapusan, informasi Penghasilan Neto hanya menampilkan sumber penghasilan suami dalam hal ini dari '**Indonesia Maju**'.

D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN						
+ Tambah						
    						
TINDAKAN	NO.	NAMA PEMBERI KERJA ↑↓	NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA ↑↓	PENGHASILAN BRUTO ↑↓	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIA YA ↑↓	PENGHASILAN NETO
 	1	Indonesia Maju	0000000000000000	182.000.000	6.000.000	
JUMLAH BAGIAN D						

LAMPIRAN

L-1 Bagian E

Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh (Kredit Pajak)

Lampiran L-1

Bagian E. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

16

> A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK

> B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

> C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

> D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

▼ E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh



NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PPh ↑↓	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PPh ↑↓	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	JENIS PAJAK ↑↓	PENGHASILAN BRUTO ↑↓	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT ↑↓
					Pilih JENIS PAJAK ▼		

Tidak ada data yang ditemukan.

	JUMLAH	
	KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN LUAR NEGERI	
	JUMLAH BAGIAN E	

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri



Secara default tampilan L-1 Bagian E **belum bisa** dilakukan penambahan penghasilan. Perlu untuk menjawab [Ya] Pertanyaan pada Induk Bagian D KREDIT PAJAK Pertanyaan 10a.

Induk

Bagian D – Kredit Pajak

17

Untuk memunculkan tombol **Tambah** pada Lampiran **L-1 Bagian E** perlu menjawab **Ya**.

▼ D. KREDIT PAJAK

10a

Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? *

☒ Ya ☐ Tidak

?

 Ya, silahkan mengisi lampiran 1 Bagian E

10b

Angsuran PPh Pasal 25

10c

STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)

10d

Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? *

☐ Ya ☒ Tidak

?

 Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

[10a] Diisi dengan pelunasan PPh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan yang telah dilakukan melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan/atau PPh yang ditanggung oleh pemerintah, yang diperhitungkan sebagai kredit pajak.

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban dan Perubahan Formulir		Regulasi	Contoh
		Ya	Tidak		
10a	Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain?	Isi Lampiran 1 (L-1) Bagian E	Lanjut ke Pertanyaan Berikutnya	Per-11 Tahun 2025	

L1 E- Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

18

✓ E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

A

+ Tambah

A

Tombol **Tambah** akan muncul setelah menjawab pertanyaan pada **Induk Bagian D. Kredit Pajak** Pertanyaan [10a]

T I N D A K A N	NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK ↑↓	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK ↑↓	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	Jenis Pajak ↑↓	DPP ↑↓	PPh
						Pilih Jenis Pajak ▼		
Tidak ada data yang ditemukan.								
								JUMLAH
								KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN LUAR NEGERI
								JUMLAH BAGIAN E

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

<< < > >> 10 ▼

Bagian E. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

- Data dapat ditambahkan melalui Tombol "+ Tambah" (memasukkan 1 data setiap waktu) atau menu "Impor data" (memasukkan banyak data sekaligus)
- Data dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah

Bagian ini digunakan untuk melaporkan kredit pajak (pelunasan pajak dalam tahun berjalan) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain

L1 E- Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

19

▼ E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

+ Tambah

B Klik tombol **Refresh** untuk memunculkan bukti potong atas penghasilan yang diterima sebagaimana pada **Lampiran 1 Bagian D**.

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK ↑↓	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK ↑↓	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	Jenis Pajak ↑↓	DPP ↑↓	PPh
						Pilih Jenis Pajak ▼		

Tidak ada data yang ditemukan.



▼ E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

+ Tambah

Eksport ke CSV	TINDAKAN	NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PPh ↑↓	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PPh ↑↓	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	
		1		3578241002640003	321X	05-01-2026	PP
		2		3578241002640003	321	05-01-2026	PP

Bukti potong akan muncul sejumlah penghasilan yang diterima sebagaimana pada **Lampiran 1 Bagian D**.

L1 E- Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

20

✓ E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

+ Tambah



C Klik logo **Pensil** untuk melihat informasi bukti potong yang bersumber dari pemberi kerja istri, dalam hal ini **Indonesia Emas**.

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PPh ↑↓	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PPh ↑↓	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	
						Pilih
	1		3578241002640003	321X	05-01-2026	PPh Pasa
	2		3578241002640003	321	05-01-2026	PPh Pasa

Penghasilan Bruto

Nama Pemotong/Pemungut PPh *	
NPWP Pemotong/Pemungut PPh *	3578241002640003
Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan *	321
Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan *	05-01-2026
Jenis Pajak *	PPh Pasal 21 × ▼
Penghasilan Bruto *	210.000.000
PPh yang Dipotong/Dipungut *	15.825.000

✕ Tutup Simpan

Catat **Informasi** yang ada dalam tampilan ini. Kemudian klik tombol **tutup**.

L1 E– Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

21

✓ E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

+ Tambah

Ekspor ke CSV

D Klik logo **Delete** kemudian klik tombol **Yes** untuk menghapus bukti potong dari pemberi kerja istri, dalam hal ini **Indonesia Emas**.

	NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PPh ↑↓	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PPh ↑↓	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	
						
D	1		3578241002640003	321X	05-01-2026	PPh P2
	2		3578241002640003	321	05-01-2026	PPh P2

Apakah Anda yakin ingin memproses?

No Yes

E Setelah berhasil melakukan penghapusan, tabel akan muncul seperti dibawah ini.

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PPh ↑↓	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PPh ↑↓	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	
E						
	1		3578241002640003	321X	05-01-2026	PPh P2

LAMPIRAN

Lampiran 2 (L-2)

Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final, Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak, Penghasilan Neto Luar Negeri

Lampiran L-2

Bagian A. Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Penghasilan Bersifat Final

23

Induk L-1 **L-2** L-3A-4 L-3B

- A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL
- B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

HEADER	
Tahun Pajak	2025
NPWP	3671065904820002

- > A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL
- > B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- > C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

Klik pada tab **L-2** untuk membuka lampiran 2

Induk L-1 **L-2** L-3A-1 L-3A-4 L-3B L-3C L-3D L-4 L-5

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab “Ya” pada pertanyaan di induk Bagian I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA Angka 14 Huruf c “APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL?”

Induk

Bagian I – Pernyataan Transaksi Lainnya

24

> H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

✓ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14a	Harta pada akhir Tahun Pajak * (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)			1.385.000.000
14b	Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? *	☒ Ya ☐ Tidak	Ya, silakan mengisi lampiran 1 Bagian B	400.000.000
14c	Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? *	☒ Ya ☐ Tidak	Ya, silakan mengisi lampiran 2 Bagian A	210.000.000
14d	Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *	☐ Ya ☒ Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	

Induk Bagian I. Ikhtisar Penghasilan Neto Pertanyaan [14c] Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan bersifat final. Untuk memunculkan tombol **Tambah** pada Lampiran **L-2 Bagian A** perlu menjawab **Ya**.

Lampiran L-2

Bagian A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

25

Induk L-1 **L-2** L-3A-4 L-3B

- A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL
- B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

A Klik tombol **Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final** untuk memunculkan menambah penghasilan dari istri.

HEADER	
Tahun Pajak	2025
NPWP	3671065904820002

A

- > A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL
- > B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- > C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

Klik pada tab **L-2** untuk membuka lampiran 2

Induk L-1 **L-2** L-3A-1 L-3A-4 L-3B L-3C L-3D L-4 L-5

Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan di induk Bagian I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA Angka 14 Huruf c "APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL?"

L2 A – Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final

26

Induk L-1 **L-2** L-3A-4 L-3B

- A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL
- B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

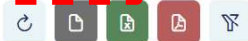
3671065904820002

B Klik tombol **Tambah** untuk menambah penghasilan dari istri.

B

▼ A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

+ Tambah



TINDAK AKA N	NO.	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT ↑↓	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT ↑↓	KODE OBJEK PAJAK ↑↓	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Ru piah) ↑↓	PPh TERUTANG ↑↓
Tidak ada data yang ditemukan.							
JUMLAH TABEL A						0	0

Bagian ini diisi dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dikenai PPh bersifat final dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk penghasilan istri yang bersumber dari satu pemberi kerja.

L2 A – Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final

27

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

1	NPWP Pemotong/Pemungut *	1234567891123456
2	Nama Pemotong/Pemungut *	Indonesia Emas
3	Kode Objek Pajak	28-499-99
4	Jenis Penghasilan	Penghasilan istri dari satu pemberi kerja X v
5	Dasar Pengenaan Pajak	Rp 210.000.000
6	PPh Terutang *	Rp 15.825.000

Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final

1. NPWP Pemotong/Pemungut PPh -> > NIK atau NPWP pemotong/pemungut pajak
2. Nama -> > nama pemotong/pemungut pajak
3. Kode -> > otomatis terisi dari isian kolom Jenis Penghasilan
4. Jenis Penghasilan -> > penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang hak dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan oleh kepala keluarga
5. DPP -> > dasar pengenaan pajak yaitu jumlah penghasilan bruto dari masing-masing jenis penghasilan
6. PPh Terutang -> > jumlah PPh yang disetor sendiri/dipotong/dipungut
7. Klik tombol simpan

L2 A – Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final

28

[Induk](#) [L-1](#) [L-2](#) [L-3A-4](#) [L-3B](#)

- A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL
- B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

HEADER	
Tahun Pajak	2025
NPWP	3671065904820002

✓ A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

+ Tambah

↺

📄

📁

📄

🔍

TINDAKAN	NO.	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT ↑↓	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT ↑↓	KODE OBJEK PAJAK ↑↓	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGEN
✎ 🗑	1	3671065904820002	Indonesia Emas	28-499-99	Penghasilan istri dari satu pemberi kerja	
						JUMLAH TABEL A

Jika pengisian berhasil, maka bagian ini akan terisi dengan informasi penghasilan yang diterima istri yang bersumber dari satu pemberi kerja.

INDUK

Induk SPT Tahunan PPh OP

Informasi Umum

Induk

K. Pernyataan

30

> F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

▼ E. PEMBEetulan (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBEetulan)

12a PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

0

12b PPh kurang/lebih bayar karena pembetulan (11a-12a)

> G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

> H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

> I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

> J. LAMPIRAN TAMBAHAN

▼ K. PERNYATAAN

ⓘ Status SPT : Nihil

☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatanganan

☒ Wajib Pajak

☐ Kuasa Wajib Pajak

NPWP

3671065904820002

Nama Lengkap

NAMA3671065904820002

Induk Bagian K. PERNYATAAN , jika sudah berhasil mengisi lampiran L-1 dan lampiran L-2 maka pada bagian ini akan muncul informasi status SPT: **NIHIL**

Induk

K. Pernyataan

31

> G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

> H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

> I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

> J. LAMPIRAN TAMBAHAN

▼ K. PERNYATAAN

① Status SPT : Nihil

☒ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatanganan

NPWP

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Wajib Pajak

Kuasa Wajib Pajak

3671065904820002

NAMA3671065904820002

C

D

Simpan Konsep

Bayar dan Laporkan

Pergi ke pencarian

C

Pada bagian pernyataan, silakan centang tanda persetujuan bahwa SPT ini telah diisi secara benar.

D

Klik tombol **Bayar dan Laporkan** jika semua informasi pelaporan telah sesuai dan lengkap.

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id





Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih

 Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id